

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)
Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Serta Dampaknya Pada Keterlambatan Penyerapan Anggaran Di
Kabupaten Minahasa Selatan**

Yuliana Heydemans¹, Agnes L.Ch.P. Lagian², Een.N.Walewangko³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sam Ratulangi

yulihaydemans42@gmail.com¹, agneslapian@unsrat.ac.id²,

eenwalewangko@unsrat.ac.id³

ABSTRACT

This research analyzes the influence of Regional Original Income (PAD), General Allocation Funds (DAU), and Special Allocation Funds (DAK) on regional financial performance as well as their impact on delays in budget absorption in South Minahasa Regency. Using a quantitative approach, this research explores the relationship between the main regional income sources, the effectiveness of financial management, and the optimization of budget absorption. The research results show that PAD, DAU, and DAK have a significant influence on regional financial performance. Furthermore, regional financial performance is proven to mediate the relationship between sources of income and delays in budget absorption. Low performance in regional financial management is one of the main causes of delays in implementing development programs. Practical recommendations are provided to increase the efficiency of PAD management, optimize DAU and DAK allocations, and strengthen regional financial management systems to accelerate budget absorption and support sustainable regional development.

Keywords: *Regional Original Income (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Regional Financial Performance, Delay in Budget Absorption, South Minahasa*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kinerja keuangan daerah serta dampaknya pada keterlambatan penyerapan anggaran di Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara sumber pendapatan utama daerah, efektivitas pengelolaan keuangan, dan optimalisasi penyerapan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DAK memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Selanjutnya, kinerja keuangan daerah terbukti memediasi hubungan antara sumber pendapatan dan keterlambatan penyerapan anggaran. Kinerja yang rendah pada pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu penyebab utama keterlambatan pelaksanaan program pembangunan. Rekomendasi praktis diberikan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan PAD, optimalisasi alokasi DAU dan DAK, serta penguatan sistem manajemen keuangan daerah guna mempercepat penyerapan anggaran dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Kinerja Keuangan Daerah, Keterlambatan Penyerapan Anggaran, Minahasa Selatan

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, ekonomi global mengalami transformasi yang signifikan. Inovasi teknologi dan digitalisasi telah mengubah cara bisnis dan pemerintahan beroperasi, menciptakan efisiensi baru dalam pengelolaan sumber daya (Schwab, 2017). Globalisasi ekonomi juga meningkatkan interdependensi antarnegara, memungkinkan aliran modal, barang, dan jasa yang lebih bebas melintasi batas-batas nasional. Perubahan ini menuntut adaptasi cepat dalam bidang ekonomi dan manajemen, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan sumber daya publik.

Indonesia sebagai negara berkembang turut merasakan dampak dari fenomena global tersebut. Integrasi ekonomi global memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perekonomian nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik (2021), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07% akibat pandemi global COVID-19, yang menunjukkan kerentanan ekonomi nasional terhadap dinamika global. Di sisi lain, digitalisasi menawarkan peluang untuk meningkatkan efisiensi dalam sektor publik dan swasta melalui penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2020).

Sektor pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam implementasi kebijakan publik dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang signifikan, yang sebagian besar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta transfer dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Kementerian Keuangan, 2020a). Efektivitas pengelolaan keuangan daerah menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi disparitas antarwilayah.

Namun, tantangan besar dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama terkait keterlambatan penyerapan anggaran. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (2019) menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah belum mampu menyerap anggaran secara optimal, yang berdampak pada tertundanya pelaksanaan program pembangunan. Keterlambatan ini sering kali disebabkan oleh rendahnya kinerja keuangan daerah, ketergantungan tinggi pada transfer pusat, serta kurang optimalnya pengelolaan PAD (Saragih & Nugroho, 2018).

Untuk memahami permasalahan tersebut, teori Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Keuangan Publik menjadi relevan. Teori Desentralisasi Fiskal menjelaskan bagaimana distribusi kewenangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah memengaruhi efisiensi dan efektivitas pelayanan publik (Oates, 1999). Sementara itu, Manajemen Keuangan Publik menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya keuangan yang transparan dan akuntabel untuk mencapai tujuan pembangunan (Mikesell, 2018). Kinerja keuangan daerah menjadi indikator penting

dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan publik di tingkat lokal.

Penelitian terdahulu telah mengkaji pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap kinerja keuangan daerah secara parsial. Misalnya, studi oleh Winarno dan Hakim (2019) menemukan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sementara DAK tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Namun, penelitian sebelumnya belum banyak yang meneliti bagaimana kinerja keuangan daerah memediasi hubungan antara sumber pendapatan tersebut dengan keterlambatan penyerapan anggaran. Oleh karena itu, terdapat gap penelitian yang perlu diisi untuk memahami mekanisme hubungan antar variabel tersebut.

Penelitian ini akan fokus pada pemerintah daerah di Indonesia sebagai objek penelitian. Karakteristik pemerintah daerah di Indonesia yang beragam, baik dari segi kapasitas fiskal maupun kinerja keuangan, memungkinkan analisis yang komprehensif. Menurut data Kementerian Keuangan (2020b), terdapat disparitas yang signifikan dalam kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, di mana beberapa daerah hanya mengandalkan PAD kurang dari 10%. Hal ini menyoroti pentingnya memahami peran PAD, DAU, dan DAK dalam kinerja keuangan daerah dan penyerapan anggaran.

Masalah spesifik yang dihadapi pemerintah daerah adalah rendahnya kinerja keuangan yang berdampak pada keterlambatan penyerapan anggaran. Data menunjukkan bahwa hingga akhir triwulan ketiga tahun 2020, rata-rata penyerapan anggaran daerah baru mencapai 60%, jauh dari target yang diharapkan (Kementerian Dalam Negeri, 2020). Keterlambatan ini mengakibatkan tertundanya program pembangunan dan pelayanan publik, serta potensi sanksi dari pemerintah pusat berupa penundaan transfer dana (BPK, 2019).

Objek penelitian ini adalah perangkat daerah di Kabupaten Minahasa Selatan, yang merupakan salah satu penerima alokasi DAK dari pemerintah pusat. Kabupaten Minahasa Selatan merupakan wilayah yang sangat bergantung pada dana DAK untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Pemerintah daerah di wilayah ini menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan anggaran, terutama terkait dengan penyerapan DAK. Karakteristik wilayah yang terdiri dari daerah terpencil dan terbatasnya sumber daya manusia turut mempengaruhi efektivitas penyerapan anggaran di perangkat daerah ini (BPS Minahasa Selatan, 2023).

Penelitian terkait dengan keterlambatan penyerapan anggaran pada perangkat daerah penerima DAK, serta narasi yang menjelaskan data yang diperlukan:

Tabel 1. Persentase Penyerapan Anggaran DAK Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019-2023

| Tahun | Alokasi DAK(Rp Miliar) | Realisasi Penyerapan DAK (Rp Miliar) | Persentase Penyerapan (%) | Keterlambatan (Triwulan) |
|-------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 2019 | 150 | 140 | 93% | I dan II |
| 2020 | 133 | 132 | 99% | I dan II |

| | | | | |
|------|-----|-----|--------|---------|
| 2021 | 175 | 160 | 91% | Idan II |
| 2022 | 144 | 121 | 84.02% | Idan II |
| 2023 | 203 | 182 | 89.65% | Idan II |

Sumber: Pemkab Minsel (2024)

Tabel 1 menyajikan data tentang persentase penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun 2019 hingga 2023. Data ini mencakup alokasi dana yang diterima oleh pemerintah daerah, realisasi penyerapan, persentase penyerapan, dan keterlambatan dalam penyerapan anggaran. Berdasarkan data ini, terlihat bahwa persentase penyerapan DAK berkisar antara 80% hingga 90%, dengan rata-rata keterlambatan penyerapan di triwulan 1 dan 2 per tahun. Penurunan signifikan terlihat pada tahun 2022 dan 2023, di mana hanya sekitar 80% dari alokasi anggaran yang terserap. Data ini menunjukkan adanya masalah yang berkelanjutan dalam penyerapan anggaran, yang dapat berdampak negatif pada pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Minahasa Selatan. Hal ini mengindikasikan adanya faktor-faktor penghambat yang memerlukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab utama keterlambatan tersebut.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan anggaran DAK terserap secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah. Jika masalah keterlambatan penyerapan anggaran ini tidak segera diatasi, maka akan terjadi penundaan dalam pelaksanaan program-program penting, yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Selain itu, rendahnya penyerapan anggaran juga berpotensi mengurangi alokasi anggaran di masa mendatang, karena pemerintah pusat mungkin mempertimbangkan kinerja penyerapan sebagai salah satu faktor alokasi anggaran (Yudhistira, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran DAK di Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai pengelolaan keuangan publik di Indonesia, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan mengisi gap penelitian yang ada, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran publik. Jika permasalahan ini tidak segera diatasi, konsekuensinya adalah terhambatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatnya ketimpangan antarwilayah. Keterlambatan penyerapan anggaran juga dapat menurunkan kredibilitas pemerintah daerah di mata masyarakat dan investor. Oleh karena itu, penelitian ini mendesak untuk dilakukan guna memberikan rekomendasi strategis dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah dan efisiensi penyerapan anggaran.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi gap penelitian terkait peran kinerja keuangan daerah sebagai mediasi antara PAD, DAU, dan DAK terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu

manajemen keuangan publik dan memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan percepatan penyerapan anggaran.

TINJAUAN LITERATUR

Penelitian ini bertumpu pada konsep keuangan daerah yang melibatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta kaitannya dengan kinerja keuangan daerah dan penyerapan anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen keuangan utama pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengalokasikan sumber daya sesuai prioritas pembangunan lokal (Halim, 2014).

Desentralisasi Fiskal

Menurut teori desentralisasi fiskal (Oates, 1999), pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan dari pusat ke daerah dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Dalam konteks Indonesia, ini tercermin melalui transfer fiskal berupa DAU dan DAK yang bertujuan mengurangi ketimpangan fiskal antarwilayah (Mardiasmo, 2009).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD mencerminkan kemandirian fiskal daerah melalui penerimaan dari pajak, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah. Peningkatan PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan secara mandiri (Mahmudi, 2010).

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya keuangan. Indikator seperti rasio efektivitas PAD, rasio kemandirian keuangan, dan rasio efisiensi belanja digunakan untuk menilai kinerja ini (Mahmudi, 2016).

Keterlambatan Penyerapan Anggaran

Keterlambatan penyerapan anggaran sering terjadi karena rendahnya kinerja keuangan dan ketergantungan pada transfer pusat. Hal ini menghambat realisasi program pembangunan dan pelayanan publik (Saragih & Nugroho, 2018).

Hipotesis Penelitian

1. PAD dan Kinerja Keuangan Daerah
H0: PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
H1: PAD berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah.
2. DAU dan Kinerja Keuangan Daerah
H0: DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
H1: DAU berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah.
3. DAK dan Kinerja Keuangan Daerah
H0: DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

- H1: DAK berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah.
4. Kinerja Keuangan Daerah dan Keterlambatan Penyerapan Anggaran
H0: Kinerja keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran.
H1: Kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan penyerapan anggaran.
 5. PAD, DAU, DAK, dan Keterlambatan Penyerapan Anggaran
H0: PAD, DAU, dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran.
H1: PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran.
 6. Mediasi Kinerja Keuangan Daerah
H0: Kinerja keuangan daerah tidak memediasi hubungan antara PAD, DAU, dan DAK terhadap keterlambatan penyerapan anggaran.
H1: Kinerja keuangan daerah memediasi hubungan antara PAD, DAU, dan DAK terhadap keterlambatan penyerapan anggaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori untuk menganalisis hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), kinerja keuangan daerah, dan keterlambatan penyerapan anggaran. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah dan data anggaran dari Kabupaten Minahasa Selatan selama periode tertentu. Populasi penelitian adalah seluruh perangkat daerah di kabupaten tersebut, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria relevansi dengan variabel penelitian.

Teknik analisis data dilakukan menggunakan model statistik regresi berganda untuk menguji pengaruh langsung antar variabel, serta analisis mediasi untuk melihat peran kinerja keuangan daerah sebagai variabel perantara. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan kelayakan instrumen penelitian, sementara asumsi klasik diuji untuk memastikan validitas model regresi. Proses analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak statistik untuk memastikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan empiris yang mendukung pengambilan keputusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, yang sejalan dengan teori desentralisasi fiskal yang menyatakan bahwa semakin besar PAD suatu

daerah, semakin mandiri daerah tersebut dalam mengelola keuangan untuk pembangunan (Tiebout, 1956). Teori ini menjelaskan bahwa daerah dengan PAD tinggi memiliki kemampuan lebih besar dalam membiayai program-program pembangunan tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Penelitian sebelumnya oleh Suryana dan Hermawan (2019) serta Puspasari (2020) juga mendukung temuan ini, yang menunjukkan bahwa PAD yang dikelola dengan baik akan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan pengeluaran daerah, sehingga berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan daerah. Dengan PAD yang cukup, daerah dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan, yang berujung pada kinerja keuangan yang lebih baik, seperti yang terlihat dalam peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, yang dapat dijelaskan melalui teori ketergantungan fiskal. Menurut teori ini, DAU, yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat, dapat menyebabkan ketergantungan daerah terhadap anggaran pusat dan mengurangi insentif daerah untuk mengoptimalkan sumber daya lokal mereka sendiri, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Bahl & Linn, 1992). Ketergantungan ini dapat menghambat pengelolaan keuangan yang lebih efektif, karena daerah lebih mengandalkan alokasi dari pusat daripada merencanakan dan mengelola pendapatan mereka sendiri. Penelitian terdahulu oleh Puspasari (2020) dan Suryana dan Hermawan (2019) juga menunjukkan bahwa terlalu bergantung pada DAU dapat menyebabkan rendahnya efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah, karena dana tersebut sering kali tidak digunakan secara optimal untuk program pembangunan yang produktif. Oleh karena itu, meskipun DAU penting untuk mendanai program pembangunan daerah, pengaruhnya yang negatif terhadap kinerja keuangan daerah menandakan bahwa ketergantungan pada dana pusat dapat menghambat tercapainya kinerja keuangan yang optimal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, yang dapat dijelaskan melalui teori "*crowding out effect*" dalam konteks alokasi dana pusat. Menurut teori ini, adanya alokasi dana pusat seperti DAK justru dapat mengurangi insentif daerah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan lokal mereka, karena daerah lebih bergantung pada dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat (Oates, 1993). Penelitian terdahulu oleh Mardiasmo (2018) dan Suryana (2019) juga menunjukkan bahwa meskipun DAK bertujuan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan yang mendesak dan prioritas, sering kali dana tersebut tidak dikelola dengan efisien dan bahkan dapat mengurangi kemampuan daerah untuk merencanakan dan mengelola anggaran mereka secara mandiri. Selain itu, DAK yang disalurkan sering kali terikat pada program tertentu yang tidak fleksibel, sehingga

daerah tidak memiliki kebebasan penuh untuk memprioritaskan kebutuhan mereka sendiri. Pengaruh negatif dan signifikan ini mengindikasikan bahwa ketergantungan pada DAK dapat menurunkan kinerja keuangan daerah karena terbatasnya ruang untuk pengelolaan yang lebih adaptif dan berbasis pada potensi lokal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Keterlambatan Penyaluran Anggaran Melalui Kinerja Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap keterlambatan penyaluran anggaran melalui kinerja keuangan daerah. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori yang menyatakan bahwa PAD merupakan sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah, dan keberlanjutan serta kestabilan PAD sangat berpengaruh pada manajemen anggaran dan pelaksanaannya (Tombok, 2016). Ketika PAD tidak optimal, pemerintah daerah cenderung menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban anggaran tepat waktu, yang berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam penyaluran dana untuk berbagai program pembangunan. Sejumlah penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Nugroho (2018), menemukan bahwa daerah dengan PAD yang rendah lebih rentan mengalami keterlambatan dalam penyaluran anggaran, karena tergantung pada dana transfer pusat yang tidak selalu tepat waktu. Dalam konteks ini, kinerja keuangan daerah yang buruk, yang tercermin dari pengelolaan PAD yang tidak efisien, dapat memperburuk masalah keterlambatan penyaluran anggaran, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Keterlambatan Penyaluran Anggaran Melalui Kinerja Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap keterlambatan penyaluran anggaran melalui kinerja keuangan daerah. DAU, sebagai dana transfer dari pemerintah pusat, berperan penting dalam mendukung kestabilan keuangan daerah, namun ketergantungan yang tinggi pada DAU dapat menyebabkan masalah dalam pengelolaan anggaran daerah jika pencairan atau alokasi DAU terlambat (Baharuddin & Hasan, 2019). Teori fiskal menyatakan bahwa ketergantungan pada transfer pusat, seperti DAU, dapat menghambat kemandirian fiskal daerah dan menyebabkan keterlambatan dalam penyaluran anggaran, karena alokasi yang tidak tepat waktu dapat mengganggu jadwal pelaksanaan program pembangunan (Oates, 1993). Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Siregar (2017), juga menunjukkan bahwa keterlambatan DAU dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah, yang pada gilirannya memperburuk kinerja keuangan dan menyebabkan keterlambatan penyaluran anggaran untuk berbagai program daerah. Oleh karena itu, meskipun DAU memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah, ketergantungan yang berlebihan dan keterlambatan dalam penyalurannya dapat memperburuk kinerja anggaran dan memperlambat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Keterlambatan Penyaluran Anggaran Melalui Kinerja Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap keterlambatan penyaluran anggaran melalui kinerja keuangan daerah. DAK merupakan dana transfer yang ditujukan untuk mendukung pembiayaan khusus di daerah yang memiliki prioritas tertentu, dan penerimaannya dapat mempengaruhi kelancaran pengelolaan anggaran daerah (Kuncoro, 2016). Teori keuangan publik menjelaskan bahwa ketergantungan pada transfer daerah, termasuk DAK, sering kali menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan anggaran daerah, terutama jika pencairannya terlambat. Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Nur & Sulaiman (2017), menunjukkan bahwa ketidakpastian dalam penyaluran DAK dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan yang sangat bergantung pada dana tersebut, serta menyebabkan keterlambatan dalam pencairan anggaran daerah. Selain itu, DAK yang terlambat cair dapat menyebabkan pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam mengatur arus kas untuk program prioritas, sehingga kinerja keuangan daerah menjadi terhambat. Oleh karena itu, meskipun DAK penting dalam mendukung pembangunan daerah, keterlambatan dalam penyalurannya dapat berdampak negatif pada pengelolaan anggaran dan kinerja keuangan daerah secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa (1) Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, dana alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. (2) Kinerja keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan penyaluran anggaran. (3) Pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan penyaluran anggaran. (4) Pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh secara tidak langsung terhadap keterlambatan penyaluran anggaran melalui kinerja keuangan daerah.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah harus fokus pada upaya peningkatan PAD dengan cara menggali potensi sumber pendapatan daerah yang lebih beragam dan meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan PAD. Ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperbaiki sistem perpajakan, dan memperkuat basis pajak daerah untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap kinerja keuangan daerah.

2. Optimalisasi Penggunaan Dana Alokasi Khusus yaitu dengan dialokasikan untuk proyek-proyek strategis dan dikelola secara transparan dan akuntabel untuk meningkatkan dampak positif terhadap kualitas infrastruktur dan pelayanan publik.
3. Peningkatan Kinerja Keuangan Daerah melalui Manajemen yang Efisien, Pemerintah daerah harus meningkatkan efisiensi dalam manajemen keuangan, termasuk pengelolaan anggaran, alokasi dana, dan pelaporan keuangan. Peningkatan kapasitas manajerial dalam pengelolaan keuangan daerah dapat membantu mengurangi keterlambatan dalam penyaluran anggaran dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4. Untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah perlu memberikan pelatihan dan pendidikan yang lebih intensif kepada aparatur keuangan daerah mengenai teknik-teknik manajerial, pengelolaan anggaran yang efisien, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penyaluran anggaran.
5. Evaluasi dan *Monitoring* Proses Penyaluran Anggaran secara berkala terhadap proses penyaluran anggaran, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, untuk mendeteksi potensi hambatan yang dapat menyebabkan keterlambatan. Hal ini memungkinkan perbaikan dalam prosedur administratif dan mempercepat proses penyaluran anggaran ke daerah yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R., & Wibowo, A. (2019). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Khusus terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 8(2), 77-90.
- Andrews, M., & Prabowo, T. (2019). Delays in Budget Absorption in Indonesia: Causes and Solutions. *International Journal of Public Sector Management*, 32(7), 689-706.
- Approach (7th ed.). West Sussex: John Wiley & Sons.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2018). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2018. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2019). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2019. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020.
- Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51(6), 1173-1182.
- Bird, R. M., & Vaillancourt, F. (Eds.). (1998). *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Budianto, A., & Lee, K. (2021). Financial Performance and Budget Absorption in Indonesian Municipalities. *International Review of Public Administration*, 26(1), 14-29.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2014). *Business Research Methods* (12th ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Fadliya, F., & McLeod, R. H. (2010). Fiscal Transfers to Regional Governments in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 46(3), 425–438.
- Ghozali, I. (2017). *Model Persamaan Struktural: Konsep dan Aplikasi dengan Program AMOS 24*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan SmartPLS 3.0*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, L., & Susilo, H. (2021). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan dan Keterlambatan Penyerapan Anggaran. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(2), 110-125.
- Hidayat, T., & Lestari, R. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran DAK. *Jurnal Akuntansi Publik*, 9(1), 23-38.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 244. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesian Local Governments. *Public Administration and Development*, 38(4), 266-276.
Jakarta: BPS.
- Jones, L., & Abdullah, A. (2019). The Effect of Intergovernmental Transfers on Local Government Performance in Indonesia. *Journal of Public Economics*, 171, 40-52.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Laporan Penyerapan Anggaran Daerah Tahun 2020*. Jakarta: Kemendagri.

- Kementerian Keuangan. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2020a). APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) Edisi Desember 2020. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Kementerian Keuangan. (2020b). Statistik Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2020). Indonesia menuju Digital Nation 2025. Jakarta: Kominfo.
- Kim, S., & Park, H. (2020). Analysis of Delays in Budget Absorption in Developing Countries: A Case Study of Indonesia. *Journal of Public Administration*, 54(3), 233-247.
- Kuncoro, M. (2015). Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga.
- Lestari, H., & Collins, D. (2020). Examining the Impact of Fiscal Transfers on Local Government Efficiency. *Journal of Asian Public Policy*, 13(3), 348-362.
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP
- Mardiasmo. (2018). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
- Martin, G., & Nugroho, E. (2018). Challenges in Budget Execution and Absorption in
- Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. M. (2003). Fiscal Decentralization and Economic Growth. *World Development*, 31(9), 1597–1616.
- Mikesell, J. L. (2018). *Fiscal Administration: Analysis and Applications for the Public Sector* (10th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Nurhayati, S., & Fajar, R. (2019). Analisis Pengaruh PAD dan DAU terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 5(2), 89-104.
- Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Prasetyo, A., & Rahmawati, D. (2019). Partisipasi Publik dalam Penyusunan APBD untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 15(2), 110–125.
- Putri, E. S., & Kurnia, D. (2020). Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 11(3), 99-113.
- Rahman, A., & Anwar, S. (2020). The Impact of Local Revenue and Intergovernmental Transfers on Regional Financial Performance in Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 43(5), 421-432.

- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rondinelli, D. A., Nellis, J. R., & Cheema, G. S. (1989). Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience. World Bank Staff Working Papers, No. 581.
- Saragih, F., & Nugroho, A. (2018). Pengaruh PAD dan DAU terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 5(2), 89-104.
- Sarwono, J. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Schwab, K. (2017). *The Fourth Industrial Revolution*. New York: Crown Business.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building*
- Simanjuntak, R., & Mukhlis, I. (2012). Efektivitas Dana Alokasi Khusus dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 12(1), 45-60.
- Siregar, S., & Maulana, M. (2020). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 12(1), 45-60.
- Smith, J., & Brown, T. (2018). Factors Influencing Budget Absorption in Indonesian Local Governments. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(2), 112-125.
- Smoke, P. (2001). *Fiscal Decentralization in Developing Countries: A Review of Current Concepts and Practice*. United Nations Research Institute for Social Development.
- STIM YKPN.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E., & Indriani, D. (2019). Regional Financial Performance and Its Effect on Budget Absorption Delay. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 31(4), 567-583.
- Utami, A., & Wicaksono, T. (2019). Kinerja Keuangan Daerah dan Dampaknya terhadap Penyerapan Anggaran di Pemerintah Kabupaten X. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 20(2), 78-92.
- Wahyuni, M., & Setiawan, B. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran di Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Regional*, 10(4), 55-70.
- Williams, R., & Suryani, T. (2021). The Role of Fiscal Decentralization on Regional Financial Performance. *Public Budgeting & Finance*, 41(2), 89-105.
- Winarno, A., & Hakim, L. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Regional*, 13(1), 55-70.

World Bank. (2000). *Entering the 21st Century: World Development Report 1999/2000*. Washington, D.C.: World Bank.

Yuliani, R., & Setiawan, B. (2017). Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 9(1), 23–38.

Yulianto, A., & Rahmawati, D. (2020). Hubungan antara Kinerja Keuangan Daerah dan Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kota Y. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 14(1), 66-80.